



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa Ketentuan tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2022/2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2022/2023.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Maksud, Tujuan Dan Asas.
- b. Prinsip Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- d. Jumlah Peserta Didik Baru Dalam 1 (Satu) Rombongan Belajar (Rombel).

- e. Jumlah Rombongan Belajar Pada Setiap Satuan Pendidikan.
- f. Syarat Pendaftaran Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Satuan Pendidikan.
- g. Biaya Pendaftaran.
- h. Penentuan Zonasi.
- i. Jalur Dan Tata Cara Pendaftaran.
- j. Tata Cara Seleksi.
- k. Daftar Ulang.
- l. Ketentuan Lain Lain.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 MARET 2022

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN PELAJARAN 2022 /2023

A. Maksud, Tujuan Dan Asas.

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Magetan serta agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dimaksud dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
2. Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah dan usia prasekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
3. Penerimaan peserta didik baru berasaskan :
 - a. obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui orang tua calon peserta didik dan masyarakat;
 - c. akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
 - d. tidak diskriminatif artinya setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat diterima untuk mengikuti pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan; dan
 - e. berkeadilan artinya setiap calon peserta didik mempunyai kesempatan dan akses yang sama sesuai ketentuan PPDB.

B. Prinsip Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

1. Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru, kecuali daya tampung sekolah tidak memungkinkan.
2. Satuan Pendidikan Menengah Pertama dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan.

C. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Tahapan pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2022/2023 adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN SD DAN SMP
1	Pengumuman Pendaftaran	Mulai bulan Mei 2022
2	Pendaftaran : a. Pendaftaran <i>Offline</i> : - Jalur Prestasi - Jalur Afirmasi - Jalur Perpindahan orangtua b. Pendaftaran <i>Online</i> : (Jalur Zonasi)	13 - 15 Juni 2022 16 - 18 Juni 2022
3	Pengumuman : a. Seleksi PPDB <i>Offline</i> b. Seleksi PPDB <i>Online</i>	16 Juni 2022 20 Juni 2022
4	Daftar Ulang : a. PPDB <i>Offline</i> b. PPDB <i>Online</i>	20 - 22 Juni 2022 21 - 23 Juni 2022
5	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	11 Juli 2022
6	Persiapan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah)	4 - 9 Juli 2022
7	Pelaksanaan MPLS	11 - 13 Juli 2022

D. Jumlah Peserta Didik Baru Dalam 1 (Satu) Rombongan Belajar (Rombel).

1. Jumlah Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak (TK) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 20 (duapuluh) peserta didik;
2. Jumlah Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar (SD) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
3. Jumlah Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tigapuluh dua) peserta didik;

E. Jumlah Rombongan Belajar Pada Setiap Satuan Pendidikan.

NO	LEMBAGA	ROMBEL
1	SMPN 1 Magetan	9
2	SMPN 2 Magetan	6
3	SMPN 3 Magetan	8
4	SMPN 4 Magetan	9
5	SMPN 1 Ngariboyo	7
6	SMPN 2 Ngariboyo	3
7	SMPN 1 Panekan	7
8	SMPN 2 Panekan	3
9	SMPN 1 Sidorejo	4
10	SMPN 2 Sidorejo	1
11	SMPN 1 Plaosan	8
12	SMPN 2 Plaosan	3
13	SMPN 3 Plaosan	2
14	SMPN 1 Poncol	6
15	SMPN 2 Poncol	1
16	SMPN 1 Parang	7
17	SMPN 2 Parang	5
18	SMPN 3 Parang	2
19	SMPN 1 Maospati	9
20	SMPN 2 Maospati	4
21	SMPN 3 Maospati	7
22	SMPN 1 Karangrejo	7
23	SMPN 2 Karangrejo	6
24	SMPN 1 Karas	5
25	SMPN 1 Barat	8
26	SMPN 2 Barat	5
27	SMPN 1 Kartoharjo	4
28	SMPN 1 Sukomoro	7
29	SMPN 2 Sukomoro	1
30	SMPN 1 Kawedanan	9
31	SMPN 2 Kawedanan	3
32	SMPN 3 Kawedanan	3
33	SMPN 1 Nguntoronadi	5
34	SMPN 1 Takeran	4
35	SMPN 1 Lembeyan	4

NO	LEMBAGA	ROMBEL
36	SMPN 2 Lembeyan	1
37	SMPN 1 Bendo	7
38	SMPN 2 Bendo	3
39	SD-SMPN Satu Atap Poncol	1
	JUMLAH	193

F. Syarat Pendaftaran Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Satuan Pendidikan.

1. Taman Kanak-Kanak (TK) :

Persyaratan calon peserta didik baru pada jenjang TK :

- b. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A;
- c. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B;
- d. melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir;
- e. Sertifikat STTPA (Standard Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak).

2. Sekolah Dasar (SD) :

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) jenjang SD :

- a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (duabelas) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
- b. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (duabelas) tahun;
- c. dikecualikan syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog professional. Dalam hal psikolog professional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;
- d. melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir.

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD;
- c. melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir
- d. memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;

G. Biaya Pendaftaran.

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru di SD dan SMP tidak dipungut biaya;

H. Penentuan Zonasi.

Penerimaan Peserta Didik Baru ditentukan berdasarkan zonasi sebagai berikut :

NO	ZONA	SEKOLAH	WILAYAH/ZONA DOMISILI	KET
1	ZONA 1	1. SMPN 1 Magetan 2. SMPN 2 Magetan 3. SMPN 3 Magetan 4. SMPN 4 Magetan 5. SMPN 1 Ngariboyo 6. SMPN 2 Ngariboyo 7. SMPN 1 Panekan 8. SMPN 2 Panekan 9. SMPN 1 Sidorjo 10. SMPN 2 Sidorejo 11. SMPN 1 Plaosan 12. SMPN 2 Plaosan 13. SMPN 3 Plaosan 14. SMPN 1 Poncol 15. SMPN 2 Poncol 16. SMPN Satap Poncol	1. Kec. Magetan 2. Kec. Ngariboyo 3. Kec. Panekan 4. Kec. Sidorejo 5. Kec. Plaosan 6. Kec. Poncol	
2	ZONA 2	1. SMPN 1 Maospati 2. SMPN 2 Maospati 3. SMPN 3 Maospati 4. SMPN 1 Sukomoro 5. SMPN 2 Sukomoro 6. SMPN 1 Karangrejo 7. SMPN 2 Karangrejo 8. SMPN 1 Karas 9. SMPN 1 Barat 10. SMPN 2 Barat 11. SMPN 1 Kartoharjo	1. Kec. Maospati 2. Kec. Sukomoro 3. Kec. Karangrejo 4. Kec. Karas 5. Kec. Barat 6. Kec. Kartoharjo	

NO	ZONA	SEKOLAH	WILAYAH/ZONA DOMISILI	KET
3	ZONA 3	1.SMPN 1 Parang 2. SMPN 2 Parang 3. SMPN 3 Parang 4. SMPN 1 Lembeyan 5. SMPN 2 Lembeyan 6. SMPN 1 Kawedanan 7. SMPN 2 Kawedanan 8. SMPN 3 Kawedanan 9. SMPN 1 Bendo 10. SMPN 2 Bendo 11. SMPN 1 Takeran 12. SMPN 1 Nguntoro- nadi	1. Kec. Parang 2. Kec. Lembeyan 3. Kec. Kawedanan 4. Kec. Bendo 5. Kec. Takeran 6. Kec. Nguntoronadi	

I. Jalur Dan Tata Cara Pendaftaran.

1. Jenjang TK dan SD :

a. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

- 1) zonasi dalam satu wilayah kecamatan;
- 2) zonasi antar kecamatan untuk TK/ SD di desa yang terletak di perbatasan kecamatan; dan
- 3) perpindahan tugas orangtua/wali

b. Pendaftaran peserta didik baru pada TK dan SD dilakukan dengan cara calon peserta didik didampingi orang tua/wali datang langsung ke sekolah yang dituju/dipilih untuk melakukan pendaftaran

2. Tingkat SMP :

a. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

- 1) Zonasi
- 2) Prestasi
- 3) Afirmasi
- 4) Perpindahan tugas orangtua/wali

b. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 (satu) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;

c. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 (dua) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;

d. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud huruf a angka 4 (empat) yaitu bagi siswa dari keluarga tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas) baik yang berasal dari dalam zona maupun luar zona;

- e. Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 (tiga) paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. Kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali dapat digunakan untuk anak guru;
- f. Khusus 4 (empat) sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah unggulan yang meliputi : SMP Negeri 1 Magetan , SMP Negeri 1 Kawedanan, SMP Negeri 1 Maospati, SMP Negeri 4 Magetan, persentase masing - masing jalur pendaftaran sekolah tersebut ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Jalur zonasi, sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
 - 2. Jalur prestasi sebesar 50% (lima puluh persen)
 - 3. Jalur afirmasi sebesar 10% (sepuluh persen)
 - 4. Perpindahan orang tua sebesar 5% (lima persen)
- g. Khusus untuk SD di Kelurahan Sarangan, Desa Dadi dan Desa Ngancar, karena faktor geografis (wilayah terpencil) dan lembaga terdekat hanya SMP Negeri 1 Plaosan, maka dalam PPDB secara otomatis dapat diterima di SMPN 1 Plaosan;
- h. Penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 WIB;
- i. Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi di SMP yang di pilih saat proses seleksi berlangsung, bila tidak mencabut berkas pendafataran, Panitia akan mengembalikan via pos sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran;
- j. Panitia penerimaan calon peserta didik pada satuan pendidikan setempat melakukan *update data* sesuai berkas yang telah diterima, dan setelah selesai wajib segera melaporkan ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan;
- k. Penghitungan nilai piagam/prestasi akademik, olah raga dan/atau seni baik perorangan atau beregu dan MTQ diverifikasi oleh sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik olahraga, dan atau seni baik perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Ujian Sekolah SD/MI diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi;
 - 2. Penghargaan terhadap prestasi tersebut dihargai bila diselenggarakan secara berjenjang, berkelanjutan dan resmi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan/Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Contoh : siswa prestasi, KSN, KOSN, FLS2N, Pekan Seni, POR, POPDA, MTQ.
 - a. Penilaian penghargaan prestasi akademik olahraga, dan atau seni baik perorangan maupun beregu, adalah sebagai berikut:

TINGKAT	JUARA	PRESTASI	
		PERORANGAN	BEREGU
INTERNASIONAL	I	50	30
	II	47,5	25
	III	45	20
NASIONAL	I	40	19
	II	37,5	18
	III	35	17
PROPINSI	I	30	16
	II	27,5	15
	III	25	14
KABUPATEN	I	20	7,5
	II	17,5	6,5
	III	15	5,5
KECAMATAN	I	10	3
	II	7,5	2
	III	5	1

b. Penilaian penghargaan prestasi yang diperoleh dari peringkat nilai ijazah di masing – masing sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) peringkat ke 1 (satu) nilai : 10
- 2) peringkat ke 2 (dua) nilai : 7,5
- 3) peringkat ke 3 (tiga) nilai : 5

3. Apabila calon peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis, maka pemberian penghargaanannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi.
 4. Calon Peserta Didik yang mempunyai prestasi akademik olahraga, dan atau seni baik perorangan maupun beregu wajib membawa sertifikat/piagam/surat penghargaan asli pada saat mendaftar dan diverifikasi oleh sekolah;
 5. Apabila dikemudian hari sertifikat/piagam/surat penghargaan atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.
1. Pendaftaran dilakukan dengan cara :
 1. *Online* untuk jalur zonasi, dengan laman web <https://dikpora.magetan.go.id/>;
 2. *Offline* untuk jalur prestasi, perpindahan orangtua / wali, dan afirmasi

- m. Bagi siswa yang dikarenakan sesuatu hal sehingga tidak bisa mengakses secara online, dapat dibantu oleh panitia PPDB dengan syarat sebagai berikut :
1. Mengambil dan mengisi formulir pendaftaran dari sekolah yang dituju
 2. Menentukan pilihan sekolah yang dituju
 3. Panitia PPDB memverifikasi dan mengakses dalam sistem *online*
 4. Peserta didik menerima print out bukti pendaftaran ditanda tangani panitia
- n. Berkas pendaftaran.
1. Jalur Zonasi :
 - a) Fotokopi ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
 - b) fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya;
 - c) menyerahkan *print out* titik koordinat tempat tinggal;
 2. Jalur Prestasi :
 - a) fotokopi ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
 - b) fotokopi sertifikat / piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan bekerjasama dengan Pemerintah dan menyerahkan bukti aslinya;
 3. Jalur Afirmasi :
 - a) fotokopi ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
 - b) menyerahkan bukti keterangan tidak mampu dan/atau sejenisnya;
 - c) bagi siswa inklusi menyerahkan surat berkebutuhan khusus dari sekolah
 4. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali :
 - a) fotokopi ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
 - b) fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya;
 - c) fotokopi Surat Penugasan orangtua / wali dari instansi / lembaga
 - d) Pemerintah yang mempekerjakan orangtua / wali yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya.

5. Variasi Pilihan

- a) Untuk PPDB *Online* (zonasi) calon peserta didik dapat memilih 2 (dua) sekolah yang dituju dalam satu zona dan 1 (satu) sekolah di luar zona terdekat apabila pagu masih tersedia;
- b) Untuk PPDB *offline* calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah sebagai sekolah tujuan;

J. Tata Cara Seleksi.

1. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai ketentuan zonasi;
2. Total nilai prestasi diambil dari nilai prestasi akademik
3. Bagi calon siswa berkebutuhan khusus, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif setiap rombongan belajar paling banyak 2 (dua) anak, dan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif maksimal ada 2 (dua) ketunaan;
4. Calon siswa yang memilih sekolah sebagai pilihan ke satu tidak bisa digeser pemeringkatannya oleh calon siswa lain yang memilih sekolah tersebut sebagai pilihan kedua;
5. Jika terdapat jarak zonasi yang sama dan jumlah nilai prestasi yang sama dari calon – calon siswa, maka pemeringkatannya berdasarkan nomor urut pendaftaran;
6. Sekolah tempat pendaftaran sebagai sekolah pilihan ke satu yang sudah memenuhi pagu, wajib mengelompokkan calon siswa yang tidak diterima sesuai dengan pilihan masing-masing untuk sekolah pilihan kedua dan menginformasikan data tersebut kepada sekolah pilihan kedua melalui *WhatsApp*, *e-mail* atau alat teknologi yang lain;
7. Sekolah sebagai pilihan kedua wajib mengambil dokumen calon siswa yang memilih sekolahnya sebagai pilihan ke dua dari sekolah tempat pendaftaran (sekolah pilihan ke satu);
8. Penyerahan dokumen calon siswa dari sekolah pilihan ke satu (tempat pendaftaran) ke sekolah pilihan kedua, harus disertai berita acara;
9. Calon siswa dapat melihat langsung di sekolah pilihan ke satu (sekolah tempat pendaftaran) atau mengakses secara *online* Pembobotan;

K. Daftar Ulang.

Calon peserta didik yang dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru diwajibkan mendaftar ulang di sekolah yang dituju, pada waktu/jadwal yang telah ditentukan.

L. Ketentuan Lain Lain.

1. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru ditandatangani Kepala SMP Negeri/Swasta dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan.
2. Di halaman sekolah tempat pendaftaran calon peserta didik baru, dipasang data pendaftar dan papan pengumuman;
3. Keadaan sementara seluruh pendaftar tersebut di atas harus dilaporkan setiap hari ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan dan sekolah wajib menempel hasil sementara proses seleksi PPDB pada papan pengumuman sekolah.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



 SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004